

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
OLEH DINAS PENGELOLAAN PASAR DI WILAYAH  
PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas  
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH :**

**WIDIYA MUSTIKA**  
**1201605**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

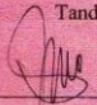
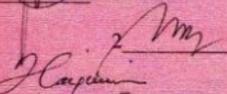
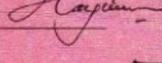
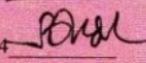
Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 13.00-15.00 WIB

**Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan  
Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi**

Nama : Widiya Mustika  
Nim/TM : 1201605 / 2012  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Agustus 2016

**Tim Penguji**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1 
Sekretaris	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	2 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	4 

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syarif Anwar, M.Pd  
NIP. 196210011989031002

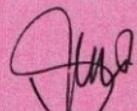
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh  
Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota  
Bukittinggi  
Nama : Widiya Mustika  
NIM/TM : 1201605 / 2012  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Agustus 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Syamsir M.Si, Ph.D  
NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II



Afriva Khaidir, MAPA, Ph. D  
NIP. 19660411 199003 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiya Mustika  
NIM / TM : 1201605 / 2012  
Tempat / Tanggal lahir : Sungai Pua, 10 November 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan



**WIDIYA MUSTIKA**

1201605/ 2012

## ABSTRAK

**WIDIYA MUSTIKA 1201605/2012 : Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi**

Latar Belakang dilakukan Penelitian ini karena masih banyaknya PKL yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pengelolaan Pasar terutama untuk menjaga Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban. Salah satu faktor penyebab hal ini adalah belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembinaan PKL (2) Mengetahui apa saja bentuk-bentuk pembinaan PKL (3) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembinaan PKL (4) Mengetahui apakah upaya yang dilakukan untuk pembinaan PKL.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode/ teknik *purposive* sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar belum dapat dikatakan efektif terlihat dari kurangnya SDM, sarana dan prasarana belum memadai, sifat manusia yang tidak pernah puas serta kurangnya partisipasi PKL dan belum dapatnya dipenuhi kriteria-kriteria efektifnya suatu program. (2) Bentuk-bentuk pembinaan PKL yaitu secara *door to door* (secara langsung) di pasar dan secara kelompok di aula Dinas Pengelolaan Pasar (3) Terdapat kendala-kendala yang ditemukan dalam pemberian pembinaan kepada PKL diantaranya terkait terbatasnya sumber daya manusia, belum memadainya sarana dan prasarana, sifat manusia yang tidak pernah puas dan kurangnya partisipasi pedagang untuk mengikuti kegiatan pembinaan. (4) Adapun langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain terkait dengan SDM dengan dimaksimalkan atau dibantu dari tenaga di bidang lain, sedangkan kurangnya sarana dan prasarana akan ditambah dan dilengkapi.

**Kata Kunci :** *Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Efektivitas, Dinas Pengelolaan Pasar*

## KATA PENGANTAR

**Assalammu'alaikum Wr. Wb**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah “Edizar” dan Ibu “Asnidar” selaku orang tua penulis yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.si, bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan penulis pelajaran dan pengalaman
8. Staff administrasi khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga masukan, saran dan motivasi yang Bapak, Ibu dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amiin

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Identifikasi Masalah .....	6
c. Pembatasan Masalah .....	6
d. Rumusan Masalah .....	7
e. Tujuan Penelitian.....	7
f. Kegunaan /Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
a. Landasan teori	
1. Konsep Efektivitas .....	9
2. Tinjauan Umum Tentang Sektor Informal .....	14
3. Konsep Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	21
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan PKL .....	28
5. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pembinaan PKL .....	30
b. Kerangka Konseptual .....	33

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

a. Jenis Penelitian.....	35
b. Lokasi Penelitian .....	36
c. Informan Penelitian .....	37
d. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	38
e. Uji Penguji Keabsahan Data .....	42
f. Teknik Analisis Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

a. Temuan Umum.....	45
b. Temuan Khusus.....	54
c. Pembahasan.....	72

### **BAB V PENUTUP**

a. Kesimpulan.....	81
b. Saran .....	83

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat izin penelitian

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor Informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan unit-unit usaha yang mendapatkan proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah disebut sebagai sektor formal. Proteksi ekonomi itu antara lain berupa tarif proteksi, kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan, penyuluhan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, terjaminnya arus teknologi impor, hak paten dan lain sebagainya. (Mulyadi S, 2008: 94)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang termasuk sektor informal. PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk

memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis. (Dwi Jatmiko, 2015).

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sektor informal, termasuk di dalamnya PKL. Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan PKL telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat. Namun pada sisi lain PKL telah menjadi fenomena sosial yang merupakan bagian pertumbuhan masyarakat. PKL termasuk ke dalam lapangan pekerjaan sektor informal dan orang-orang yang masuk ke dalam sektor ini bertujuan untuk mencari kesempatan kerja, pendapatan dan memperoleh keuntungan yang besar.

Kota Bukittinggi merupakan kota yang dinamis. Hampir semua wilayahnya menarik warga atau pendatang untuk dijadikan sebagai tempat mencari nafkah, terutama berjualan atau berdagang dengan sistem kaki lima (PKL) (Nasrul Tanjung, 2015). Berbicara tentang PKL, pada saat sekarang ini Kota Bukittinggi ditandai dengan maraknya keberadaan PKL yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Keberadaan PKL di Bukittinggi saat ini tersebar di Jl. Soekarno Hatta, Jl. Perintis Kemerdekaan, Pasar Atas, dalam Pasar Bawah, dalam Pasar Aur Tajunggang dan beberapa tempat lainnya.

Keberadaan PKL sering berhubungan dengan masalah pembinaan dan pengurusan, seolah telah menjadi satu mata rantai tak terpisahkan. Pembinaan PKL di Kota Bukittinggi merupakan wewenang Dinas Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan berdasarkan RENSTRA Kota Bukittinggi maka tugas pokok Dinas Pengelolaan Pasar adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Pengelolaan Pasar, salah satu program dan kegiatannya yaitu pembinaan PKL. Pembinaan disini bermaksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL ke arah yang lebih baik. Pembinaan PKL disini lebih diarahkan pada kegiatan untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3). Dengan demikian, untuk mencapai hal tersebut maka pembinaan harus dilakukan secara efektif, karena menurut Etzioni dalam Syamsir Torang (2013: 99) Efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Apabila pembinaan dilakukan dengan efektif maka akan mampu mewujudkan PKL yang seimbang, serasi dan selaras. Seperti yang dikemukakan oleh Hidayat dalam Maifori Watiah (2011: 4) bahwa tujuan pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan adanya tertib lingkungan yang serasi yang meliputi penertiban umum dan kebersihan lingkungan.
2. Terwujudnya lokasi tempat usaha bagi PKL yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota.
3. Berfungsinya sarana kelengkapan kota agar sesuai dengan fungsinya.
4. Tumbuhnya wirausaha yang tangguh, mandiri dan kuat.
5. Terpenuhinya kebutuhan pembeli atau masyarakat sesuai dengan pertumbuhan kota dan gaya hidup masyarakat perkotaan.

Fenomena PKL telah banyak menyita perhatian pemerintah. Pada saat sekarang ini dalam wilayah Pasar Atas (Pasar Lereng, Pasar Putih dan sekitarnya) Kota Bukittinggi ditandai dengan banyaknya keberadaan PKL yang menjajakan aneka pernik-pernik seperti pakaian, hiasan dinding, boneka, mainan anak-anak dan lain sebagainya (Fitri Prawitasari, 2014). PKL di dalam wilayah pasar Kota Bukittinggi terdiri dari sebagian pedagang yang terdaftar dan memiliki kartu kuning dan sebagian terdiri dari pedagang yang tidak terdaftar sebagai pedagang resmi dan tidak memiliki kartu kuning dari Dinas Pengelolaan Pasar.

Walaupun sudah diatur dalam Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun keberadaan PKL seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, pada tanggal 20 sampai 27 Desember 2015 di sekitar wilayah pasar Atas Kota Bukittinggi, terlihat permasalahan yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, dan ketertiban diantaranya penggunaan ruang publik yang bukan untuk fungsi semestinya. Seperti trotoar disediakan oleh pemerintah untuk pejalan kaki malah digunakan oleh PKL untuk membuat lapak yang sangat buruk atau tidak layak. Banyak para pedagang yang memakai akses jalan dan lokasi parkir untuk berjualan sehingga mengganggu pemandangan dan ketertiban, kurangnya kesadaran para pedagang dalam menata dan menyusun barang dagangannya menyebabkan tata ruang kota terlihat menjadi

kacau dan kurangnya kesadaran para pedagang dalam membuang sampah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Selain permasalahan diatas, terlihat bahwa kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar kepada seluruh PKL. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh salah seorang PKL di wilayah Pasar Atas yang bernama Bapak David, yang penulis wawancarai pada tanggal 16 Maret 2016 beliau mengungkapkan bahwa:

“Setahu saya, tidak ada sosialisasi kepada PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk mengikuti pembinaan di Dinas Pengelolaan Pasar, walaupun ada pemberian pembinaan hanya berupa arahan dan ceramah untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dan itu pun menurut saya kurang efektif, karena sebagian PKL hanya menata dan menyusun barang dagangannya saat dilakukan pembinaan secara langsung di pasar”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Annisa (Pedagang Kerupuk) yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Maret 2016, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya pembinaan yang diberikan belum efektif, karena pemberian pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, melalui ceramah atau arahan dengan menggunakan alat bantu penguat suara serta berjalan mengelilingi pasar untuk memberikan informasi kepada pedagang, sehingga saya tidak mendengarkan sepenuhnya informasi yang diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kurang efektifnya pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pengelolaan pasar, menyebabkan terbatasnya informasi yang dapat diterima oleh PKL.

Berkaitan dengan fenomena di atas, untuk itu pembinaan harus dilakukan guna perbaikan penataan PKL ke depan, maka penulis sangat tertarik untuk

mengadakan penelitian serta pengamatan mengenai **“Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Maraknya keberadaan PKL mengakibatkan banyaknya penggunaan ruang publik yang bukan untuk fungsi semestinya
2. Banyak para pedagang yang memakai akses jalanan lokasi parkir untuk berjualan sehingga mengganggu pemandangan dan ketertiban
3. Kurangnya kesadaran para pedagang dalam menata dan menyusun barang dagangannya menyebabkan tata ruang kota terlihat menjadi kacau
4. Kurangnya kesadaran para pedagang dalam membuang sampah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan
5. Kurang tersosialisasikannya kegiatan pembinaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar keseluruhan PKL dan
6. Masih kurangnya kegiatan pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas diperoleh dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun penulis ingin memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada Efektivitas

Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana efektivitas pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi?
2. Apa saja bentuk-bentuk pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Dinas Pengelolaan Pasar dalam pembinaan PKL di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi?
4. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk pembinaan PKL di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pembinaan PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Dinas Pengelolaan Pasar dalam pembinaan PKL di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi

4. Untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk pembinaan PKL di Wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi

#### **F. Kegunaan/ Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya, Kebijakan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima untuk tidak membuat lapak atau untuk tidak berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah agar dapat melindungi diri mereka sendiri dan orang lain
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pembinaan dan penegakan peraturan kepada pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana administrasi publik pada jurusan IAN FIS UNP.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Konsep Efektivitas**

##### **a. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disamping itu menurut Robbins dalam M. Pabundu Tika (2010:129) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian Schein mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya.

Sementara itu Steers dalam Edy Sutrisno (2011:123-124) menjelaskan bahwa pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Selain itu, menurut Katzell dan Kahn dalam Dharma Setyawan Salam (2004: 112) konsep efektivitas digunakan untuk merujuk kepada derajat pencapaian tujuan. Oleh karena itu keefektifan suatu organisasi dengan

program-program kerjanya dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebagai upaya kerjasama.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi**

Menurut Peters dan Waterman dalam Edy Sutrisno (2011:146), mengemukakan ada delapan kriteria yang mempengaruhi efektivitas organisasi, antara lain:

- 1) Mereka mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan
- 2) Mereka selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan
- 3) Mereka memberi pegawai suatu tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk semangat kewiraswastaan (*entrepreneurial spirit*)
- 4) Mereka berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainya
- 5) Para pegawai mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajer terlibat aktif pada di semua tingkat

- 6) Mereka selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami
- 7) Mereka mempunyai struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas-aktivitas staf pendukung
- 8) Mereka menggabungkan kontrol yang ketat dan disentralisasi untuk mengamankan nilai-nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar di bagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan risiko serta inovasi.

Sedangkan Steers dalam Edy Sutrisno (2011: 148), mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu:

- 1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi.
- 2) Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan ekstern dan lingkungan intern.
- 3) Karakteristik karyawan, yang meliputi keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja.
- 4) Kebijakan praktik manajemen.

### **c. Indikator Efektivitas Organisasi**

Untuk mengetahui efektifitas suatu program yang dijalankan sebuah organisasi perlu diketahui indikator-indikator untuk mengukur derajat keberhasilan suatu program apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Epstein dalam Dharma Setyawan (2007: 63) menyatakan bahwa ada empat kriteria untuk mengukur keefektifan suatu program pemerintah daerah yaitu (1) kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol, (2) adanya program layanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, (3) mengukur kualitas layanan pemerintah tersebut terutama dengan ukuran kepuasan dan persepsi masyarakat, (4) pemberi layanan tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Steers dalam Edy Sutrisno (2011:123-124) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan yaitu:

1) Optimalisasi tujuan-tujuan

Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama yang lain saling berkaitan.

2) Perspektif sistem

Yang dimaksud ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling berhubungan, struktur, dan saling ketergantungan

satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen ialah input, proses, dan output. Sebagai sistem suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Jadi, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, melainkan juga segi sistem.

### 3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi

Ancangan ini digunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusialah suatu perusahaan tidak efektif.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efektifitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria-kriteria efektifitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian (2001) mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran efektifitas. Efektifitas dapat diukur dari berbagai hal, yaitu: (1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, (4) perencanaan yang matang, (5) penyusunan program yang tepat, (6)

tersedianya sarana dan prasarana kerja, (7) pelaksanaan yang efektif dan efisien, (8) sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Efektivitas pembinaan pedagang kaki lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar pada penelitian ini didasarkan pada teori Epstein dalam Dharma Setyawan (2007:63) yaitu kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol, adanya program layanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, mengukur kualitas layanan pemerintah tersebut terutama dengan ukuran kepuasan dan persepsi masyarakat, dan pemberi layanan tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Sektor Informal**

### **a. Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Sub Sektor Informal**

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan salah satu sub sektor informal yang keberadaannya sangat nyata terutama di daerah perkotaan di Indonesia. Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kota, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu ciri dan karakteristik dari negara-negara yang sedang berkembang.

Menurut Mc Gee, Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari orang-orang yang menawarkan barang-barang atau menjual jasa-jasa dari tempat-tempat masyarakat umum terutama di jalan-jalan serta di trotoar (Argyo Demartoto dkk, 2000:16).

Menurut Kartini Kartono, definisi dari Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha (produksi/ penjualan barang-barang/jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, usaha mana dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis, dalam suasana lingkungan yang informal. (Kartini Kartono, 1980:7)

Disamping itu, Kartini Kartono memberikan karakteristik dari Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya dapat dikatakan bahwa para Pedagang Kaki Lima berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal
- 2) Perkataan “kaki lima” memberi pengertian bahwa mereka pada umumnya menjual barang-barang dagangan pada gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka pertokoan yang dianggap strategis
- 3) Para Pedagang Kaki Lima pada umumnya memperdagangkan bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lain yang dijual secara eceran
- 4) Para Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil, bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat komisi
- 5) Pada umumnya kuantitas barang-barang yang diperdagangkan oleh para Pedagang Kaki Lima itu relatif rendah

- 6) Kualitas barang dagangan para Pedagang Kaki Lima itu relatif tidak seberapa
- 7) Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang pedagang yang sukses agak langka
- 8) Pada umumnya usaha para Pedagang Kaki Lima merupakan usaha yang melibatkan struktur anggota keluarga
- 9) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri khas dalam usaha Pedagang Kaki Lima
- 10) Ada Pedagang Kaki Lima yang melaksanakan pekerjaan secara musiman dan sering terlihat barang dagangan juga berganti-ganti.
- 11) Mengingat faktor kepentingan, maka pertentangan kelompok Pedagang Kaki Lima itu merupakan kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang ekonomi, walaupun perasaan serta kawan cukup kuat diantara mereka (Kartini Kartono, 1980:15).

Pedagang Kaki Lima adalah suatu profil dan karakteristik dari unit usaha dengan modal dan keterampilan yang relatif rendah, yang bertempat di jalan-jalan atau trotoar untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, baik yang berjualan menetap maupun yang berkeliling, yang masing-masing dibagi lagi menurut jenis dagangannya yaitu makanan dan minuman, sayuran dan atau buah-buahan, alat-alat rumah

tangga, alat-alat tulis, bahan bakar, barang bekas (Argyo Demartoto dkk, 2000).

#### **b. Pengertian dan Ciri-ciri Sektor Informal**

Istilah sektor informal dalam Mulyadi S (2008: 94) oleh Keith Hart pada tahun 1971 dalam penelitiannya tentang unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian terminologi Hart tersebut digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diorganisir oleh ILO (*International Labor Organization*). Misi tersebut berpendapat bahwa sektor informal telah memberikan tingkat ongkos yang rendah, padat karya, barang dan jasa yang kompetitif, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kenya untuk mendorong sektor informal. (Gilber dan Josef Gugler, 1996).

Dalam laporan ILO tersebut dan dari berbagai penelitian tentang sektor informal di Indonesia (Hidayat, 1978), telah menghasilkan sepuluh ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- 2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha
- 3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja
- 4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini

- 5) Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor
- 6) Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif
- 7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil
- 8) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man-enter prises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga
- 9) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi
- 10) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah.

Perekonomian di sektor informal relatif dapat lebih mandiri. Karena pertumbuhan di sektor informal secara langsung memperbaiki kesejahteraan golongan ekonomi lemah, maka kemajuan dalam sektor informal sekaligus menaikkan pendapatan nasional (meskipun tidak banyak), dan memperbaiki distribusi pendapatan. Apabila di sektor formal kurangnya permintaan dapat menyebabkan kelesuan perekonomian, di sektor informal permintaan akan selalu kuat, sebab barang dan jasa yang dihasilkan di sektor ini merupakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sehari-sehari.

Widarti (1983) dan Hugo (2000) menggunakan status pekerjaan utama untuk pengelompokan sektor formal dan sektor informal. Mereka yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu anggota

rumah tangga, dan pekerja keluarga dimasukkan ke dalam sektor informal. Sedangkan mereka yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan berusaha dengan dibantu buruh tetap dimasukkan ke dalam sektor formal.

Sedangkan Soetjipto Wirosardjono memberikan batasan mengenai ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut:

- 1) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya
- 2) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
- 3) Modal, peralatan, maupun perlengkapan dan omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar perhitungan harian
- 4) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya
- 5) Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain
- 6) Umumnya dilakukan oleh dan untuk melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- 7) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja.
- 8) Menggunakan buruh sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.

9) Tidak menganal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan lain sebagainya (Soetjipto Wirosardjono, 1985:5 ).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dengan beberapa ciri, tampak bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup berbagai kegiatan usaha yang bersifat wiraswasta dimana campur tangan pemerintah terutama dalam hal modal sangatlah kurang. Begitu juga dengan aturan-aturan hukum yang tampaknya jauh dari jangkauan sehingga kehadirannya dianggap melanggar norma terutama ketertiban umum. Oleh karena itu banyak pihak yang memposisikan sektor informal sebagai bagian dari sektor ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Padahal pada hakekatnya, sektor informal dapat dijadikan sebagai sektor ekonomi yang dapat dibina dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi riil. Hal tersebut disebabkan karena ditinjau dari daya serapnya, ternyata jumlah pekerja sektor informal ini semakin meningkat. Besarnya daya serap tersebut sebenarnya merupakan cerminan bahwa sektor formal dirasa sudah tidak mampu lagi untuk menampung penambahan angkatan kerja. Asumsinya adalah bahwa orang akan selalu berusaha untuk dapat bekerja di sektor formal yang lebih memberikan jaminan dibanding sektor informal. Hanya saja apabila sudah tidak tersedia lagi kesempatan kerja di sektor formal, mau tidak mau orang akan mencari alternatif lain yang salah satunya adalah menciptakan kesempatan kerja di sektor informal.

Namun disamping itu ada juga beberapa pihak yang sengaja terjun di sektor informal, jadi bukan lantaran sudah tidak ada kesempatan lagi baginya untuk bekerja di sektor formal. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa sektor informal lebih mempunyai daya tarik, sehingga dapat memberikan imbalan yang sesuai dengan kemampuan. Dimana kemampuan setiap individu yang dibutuhkan untuk memasuki sektor informal tidaklah terlalu berat, bahkan bisa dikatakan bahwa setiap individu bisa memasukinya apabila mempunyai kemauan dan sedikit kemampuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pekerja di sektor informal belum tentu terdiri dari orang-orang yang putus asa karena tidak tertampung dalam sektor formal.

### **3. Konsep Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

#### **a. Pengertian Pembinaan**

Menurut Thoha (1989:7) pembinaan adalah proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evaluasi atau berbagai kemungkinan sesuatu. Sementara itu, Soerjono Soekanto (1996:493) mengemukakan bahwa sosialisasi atau pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar pihak yang dididik atau diajak, kemudian mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Kemudian menurut Widjaya dalam Windha Widya Lestari (2014: 240) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali

mendirikan, menumbuhkan, memelihara, pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan pada akhirnya mengembangkannya.

Menurut UU No. 9 Tahun 1995 Pasal 1(e) menjelaskan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sementara itu, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 disebutkan pengertian pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi, dan seksama menurut rencana atau program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem, dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan pemberian, pengarahan, latihan, dan bimbingan untuk mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru supaya dapat mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan.

#### **b. Tahap-tahap Pembinaan**

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam melaksanakan pembinaan adalah meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. (Ericson Damanik, 2015)

Parsonet.al (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pembinaan yaitu merujuk pada :

- 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- 3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan. (Ericson Damanik, 2015)

#### **c. Strategi dan Prinsip Pembinaan**

Parson et.al (Ericson Damanik, 2015) menyatakan bahwa proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekejaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui:

- 1) Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan.
- 2) Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.

- 3) Asas Makro, pendekatan sistem besar, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

#### **d. Model-model Pembinaan**

Model-model pembinaan menurut Arum Puspita Sunaryo (2007: 53-54) terdiri dari:

- 1) *Door to door*

Model pembinaan ini yaitu dengan mendatangi langsung PKL satu persatu. Pembinaan model ini terutama dilakukan pada PKL yang keberadaannya dirasa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Dengan dilakukan pembinaan secara *door to door* diharapkan para PKL lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari pembinaan tersebut. Akan tetapi pembinaan model *door to door* ini kurang efektif karena memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar.

- 2) Secara Kelompok

Pembinaan secara kelompok dilakukan melalui institusi maupun penyuluhan PKL. Model pembinaan kelompok ini dilakukan dengan mengumpulkan PKL berdasarkan wilayah usahanya dan

biasanya dilakukan di kantor kecamatan maupun kelurahan. Pembinaan model ini lebih efisien karena menghemat waktu dan biaya.

**e. Keterampilan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Menurut Siswanto dalam M. Hassan Su'ud (2007:11) Keterampilan adalah keahlian untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diserahkan kepada tenaga kerja. Pekerjaan tersebut memerlukan kualitas tertentu sebagai ukuran terhadap "*kualitas kerja*", yaitu mutu hasil kerja yang sebaik-sebaiknya yang dihasilkan oleh tenaga kerja sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan yang diserahkan ataupun yang dikerjakannya, berupa keluaran yang diharapkan.

Meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam pekerjaan dapat ditempuh melalui pengembangan sumberdaya manusia yang pembinaannya dimulai dalam kalangan keluarga.

Pembinaan sumberdaya manusia sangat tergantung kepada jenis pekerjaan, status pekerjaan dan lapangan pekerjaan. Undang-undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 173 (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Lebih lanjut pasal tersebut juga menjelaskan bahwa pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang

berhubungan dengan ketenagakerjaan dilakukan oleh pemerintah dan dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, dan organisasi profesi terkait. Selanjutnya pada pasal 174 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerjasama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan, milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehubungan dengan pembinaan PKL, dalam arti bahwa pembinaan adalah pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah ke arah yang lebih baik. Terdapat 7 (tujuh) aspek pembinaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendataan PKL
- 2) Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL
- 3) Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL

- 4) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL
- 5) Bimbingan teknis pelatihan supervisi kepada PKL
- 6) Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL, dan
- 7) Monitoring dan evaluasi.

#### **4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan PKL**

Kendala-kendala dalam pembinaan PKL ini dilihat dari kendala-kendala internal dan kendala eksternal. (Maifori Watiah, 2011: 86-88)

##### **a. Kendala Internal**

Menurut Dirgantoro (2001) kendalaInternal, adalah yang berasal dari dalam organisasi. Kendala internal yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan ini yaitu berkaitan dengan pembiayaan yang disediakan untuk kegiatan ini. Disamping itu menurut Purnomo (1999) lingkungan internal yang mempunyai implikasi langsung terhadap organisasi salah satunya adalah sumberdaya yang merupakan input yang dibutuhkan oleh organisasi untuk melaksanakan suatu program dan aktivitas organisasi. Selain itu kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas dengan mitra kerja dan masyarakat pedagang itu sendiri.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala dari luar organisasi yang juga berimplikasi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Kendala Eksternal yang dihadapi dalam pembinaan PKL yaitu berasal dari PKL itu sendiri diantaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran dari PKL untuk mengikuti kegiatan pembinaan
- 2) Kebijakan pemerintah dalam menetapkan frekuensi pemberian pembinaan dengan penyuluhan
- 3) Belum tegasnya aturan-aturan mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kaki lima dan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kaki lima.

Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembinaan PKL yaitu antara lain: (Arum Puspita Sunaryo, 2007: 63)

- a. Kurangnya sumber daya manusia
- b. Kurangnya dukungan masyarakat
- c. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.

## **5. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan PKL**

Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan PKL antara lain: (Ridwan Ansori Daulay, 2010: 11-12)

### **a. Pendekatan Vertikal**

Guna mengatasi persoalan PKL, upaya penataan yang dapat dilakukan secara vertikal antara lain menyangkut perbaikan dari segi perizinan, pembinaan dan pemberian bantuan kepada PKL. Perizinan bagi aktivitas PKL dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan agar memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah, membantu dalam penarikan retribusi.

### **b. Daya Dukung Lingkungan**

Bagi PKL yang berada di kawasan tertentu yang masih memungkinkan untuk ditoleransi, kebijakan penataan yang realistis adalah dengan program rombongan atau tendanisasi. Meskipun program ini bukan jalan keluar yang terbaik bagi ketertiban kota, program ini paling realistis karena dapat mengompromikan kepentingan PKL agar tetap diperbolehkan berdagang di kawasan ramai. Sementara pada saat yang sama keindahan kawasan itu tetap terjaga karena para PKL bersedia diatur sedemikian rupa.

Keberadaan PKL dirasakan perlu dengan syarat tidak mengganggu ruang publik yakni fungsi bahu jalan untuk pejalan kaki dan fungsi jalan bagi kendaraan bermotor. Karena itu perlu dihitung berapa daya dukung bahu jalan bagi PKL agar PKL tetap dapat berdagang dan masyarakat tidak diganggu hak publiknya.

c. Aspiratif

Dalam perencanaan tata kota, relokasi PKL seharusnya melibatkan PKL mulai dari tahap penentuan lokasi hingga kapan harus menempati. Rekomendasi kebijakannya adalah penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Pemerintah mestinya serius untuk mendengarkan aspirasi para PKL melalui paguyuban-paguyuban PKL di lokasi masing-masing, sehingga program-program penataan yang diluncurkan tidak menjadi sia-sia belaka.

d. Pemberdayaan Ekonomi

Arus uang illegal dari PKL ke preman, oknum PP, polisi atau tentara seharusnya ditiadakan. Arus uang illegal tersebut dapat digantikan oleh tabungan pemberdayaan ekonomi PKL. Tabungan tersebut bertujuan agar PKL dapat memiliki lahan sendiri untuk berdagang kedepannya sehingga tidak terus menerus sampai tua dikejar-kejar aparat karena berdagang di tempat yang illegal.

#### e. Pembinaan Mental

Mengelola PKL bukan hanya mengelola tempat tetapi juga mengelola orang. Salah satu keonganan orang untuk berbelanja di pasar adalah kesadaran lingkungan yang rendah dan ketidakjujuran. Kesadaran lingkungan yang rendah terhadap sampah dan aroma yang menyengat hidung juga menyebabkan kalah populernya PKL dibanding pusat perbelanjaan modern, dan ketidakjujuran sangat mengganggu proses jual beli di PKL. Untuk mencegah dan mengurangi hal tersebut salah satu cara dengan *social value system* atau nilai-nilai yang mengikat di masyarakat. Upaya pembinaan mental terhadap PKL perlu dilakukan agar PKL menjadi lebih jujur dan sadar lingkungan.

Selain itu upaya dalam mengatasi kendala dalam pembinaan PKL yaitu Pemerintah harus berusaha secara bijak dan terbuka dengan menyadarkan kepada masyarakat, baik terhadap PKL itu sendiri maupun konsumennya untuk selalu berusaha mentaati segala aturan yang ada dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang harus diambil dalam mengatasi permasalahan dalam pembinaan PKL itu adalah : (Yuli Utomo, 2012)

##### a. Alokasi tempat

Pemerintah tidak hanya memberikan peringatan kepada PKL saja yang melakukan kesalahan namun juga harus mampu memberikan

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah memberikan lahan atau tempat untuk berjualan kepada pihak PKL.

b. Sarana dan prasarana

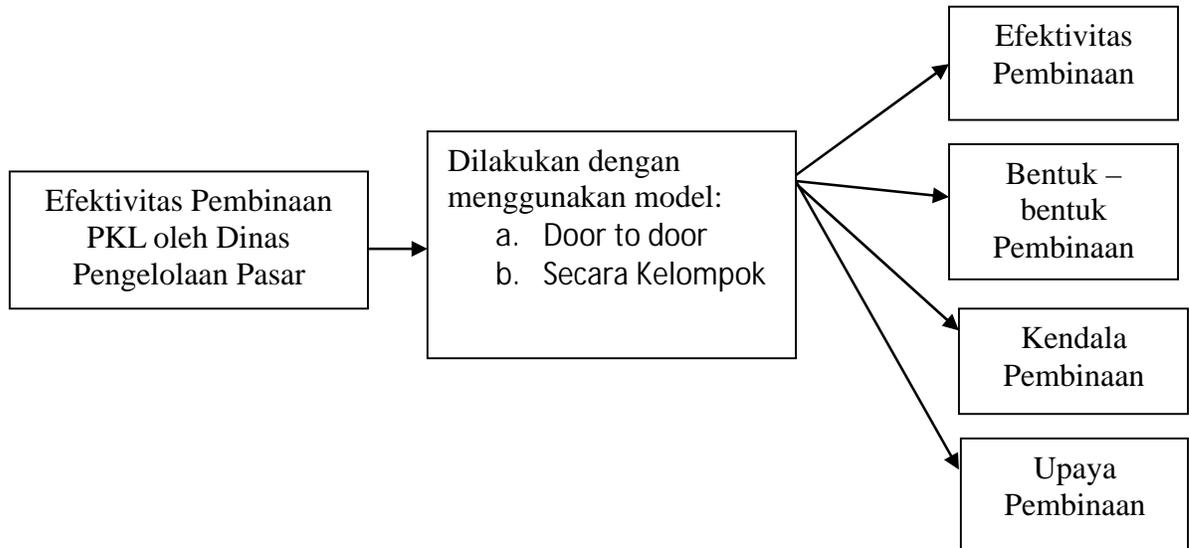
Untuk dapat menjual dagangannya maka PKL harus diberikan sarana dan prasarana yang baik sehingga baik pedagang maupun para pengunjung segan dan menikmati suasana yang menyenangkan sehingga betah ada ditempat tersebut.

c. Adanya peraturan dan larangan

Baik PKL maupun pengunjung tetap harus mentaati peraturan dan larangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan dagang dapat berjalan secara teratur dan tertib.

## **B. Kerangka Konseptual**

Penelitian kali ini akan meneliti tentang Efektivitas Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar di wilayah Pasar Atas Kota Bukittinggi. Secara skematis gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini dituangkan sebagai berikut:

**Gambar 1.**

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan PKL di Wilayah Pasar Atas oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi belum dapat dikatakan efektif hal ini dikarenakan masih belum dapatnya dipenuhi kriteria-kriteria efektifnya suatu program diantaranya dilihat dari (a) Kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol, dalam hal ini kebutuhan masyarakat belum terpenuhi dengan baik oleh Dinas Pengelolaan Pasar. (b) Adanya program layanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, Kalau dalam hal ini sudah adanya kegiatan pembinaan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada PKL. (c) Mengukur kualitas layanan terutama dengan ukuran kepuasan dan persepsi masyarakat, dimana dalam hal ini ditandai dengan banyaknya PKL yang kontra dengan tindakan Dinas Pengelolaan Pasar. (d) Pemberi layanan tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, disini Pihak Dinas Pengelolaan Pasar sudah berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi PKL.
2. Bentuk-bentuk pembinaan PKL di Wilayah Pasar Atas oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi yaitu secara *Door to doory* yaitu aparat dari Dinas Pengelolaan Pasar mendatangi PKL secara langsung di pasar

3. dan secara kelompok yaitu dengan mengumpulkan beberapa orang PKL berdasarkan wilayah usahanya untuk diberikan pembinaan di aula Dinas Pengelolaan Pasar.
4. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada PKL adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, sifat manusia itu sendiri yang tidak pernah puas serta kurangnya partisipasi pedagang untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Jika dilihat dari kendala yang lain yaitu adanya kendala internal yang berasal dari dalam organisasi dan kendala eksternal yang berasal dari luar organisasi, baik kendala internal maupun kendala eksternal keduanya tentu saja dapat menghambat tercapainya efektivitas pembinaan PKL.
5. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam memberikan pembinaan kepada PKL yaitu dengan dimaksimalkan atau dibantu dari tenaga yang berasal dari bidang lain, sarana dan prasarana yang belum memadai akan dimaksimalkan, sifat manusia (PKL) yang tidak pernah puas akan terus diusahakan untuk berubah serta akan meningkatkan partisipasi pedagang untuk mengikuti kegiatan pembinaan.

## **B. Saran**

Melihat kondisi pembinaan PKL di Wilayah Pasar Atas oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada Pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi untuk menambatkan sumber daya manusia karena dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam memberikan pembinaan kepada PKL mengakibatkan tidak efektifnya proses pemberian pembinaan kepada PKL serta melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada PKL.
2. Diharapkan kepada Dinas PKL Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi untuk lebih persuasif memberikan kegiatan pembinaan kepada PKL dan seharusnya pihak Dinas lebih menggunakan tahap- tahap pembinaan dalam membina PKL.
3. Diharapkan kepada PKL untuk mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh Dinas Pengelolaan Pasar mengenai lokasi yang di perbolehkan untuk melakukan aktivitas kaki lima dan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kaki lima.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Argyo Demartoto, dkk. 2000. *Sektor Informal Alternatif Kesempatan Kerja bagi Golongan Berpendidikan Rendah Dan Miskin*. Surakarta : Makalah Diktat Penelitian UNS.
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Jambatan.
- Edy Sutrisno. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana
- Kartini Kartono. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung : UNPAD
- Matthew B. Milles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta : UI.
- Mifta Thoha.1989. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: cv. Rajawali
- Moh. Pabundu Tika. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi S. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Hassan Su'ud. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Agribisnis*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh

M. Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Soerjono, Soekanto.1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo

Soetjipto Wirosardjono. 1985. *Pengertian, Batasan, Dan Masalah Sektor Informal*. Jakarta: LP3E

Sondang P. Siagian 2001. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Graha Indonesia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Syamsir Torang. 2013. *Organisasidan Manajemen*. Bandung: Alfabeta

#### **Sumber- sumber online:**

Windha Widya Lestari, 2014. “Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Kota Samarinda”.*ejournal Ilmu Komunikasi* Vol. 2 No. 2 2014

Arum Puspita Sunaryo. 2007. “Efektifitas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima”.<https://digilib.uns.ac.id> (diakses tanggal 06 April 2016)

Dwi Jatmiko. 2015. “Skripsi Pengaruh Kinerja Satpol PP terhadap Penataan PKL”.<http://sangpujanggakecil.blogspot.co.id/2015/05/skripsi-pengaruh-kinerja-satpol-pp.html> (diakses tanggal 24 Maret 2016)

Ericson Damanik. 2015. “Pengertian, Tujuan dan Strategi dan Prinsip Pembinaan Menurut Ahli”. <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-tujuan-pembinaan-menurut-ahli.html> (diakses tanggal 02 Maret 2016)

Fitri Prawitasari. 2014. “Ada Jam Gadang Mini di Pasar Atas”.<http://travel.kompas.com/Ada.Jam.Gadang.Mini.di.Pasar.Atas> (diakses tanggal 13 Februari 2016)

Maifori Watiah. 2011. “Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung”.

[http://digilib.unila.ac.id/552/7/Maifori%20Watiah\\_Bab%20I.pdf](http://digilib.unila.ac.id/552/7/Maifori%20Watiah_Bab%20I.pdf) (diakses tanggal 25 Maret 2016)

Nasrul Tanjung. 2015. “39 Pelanggar Perda diajukan ke Pengadilan”.  
<http://news.padek.co/detail/a/235> (diakses tanggal 11 Januari 2016)

Ridwan Ansori Daulay. 2010. “Upaya Pemerintah dalam menanggulangi PKL”.  
<http://www.slideshare.net/ridwanansoridaulay/upaya-pemerintah-dalam-menanggulangi-pkl> (diakses tanggal 25 Maret 2016)

Yuli Utomo. 2012. “Pedagang Kaki Lima dan Kebijakan Publik”.  
<http://yuliutomo.blogspot.co.id/2012/02/pedagang-kaki-lima-dan-kebijakan-publik.html> (diakses tanggal 03 April 2016)

#### **PeraturanPerundang- undangan:**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja